

## PERAN SDM, KOMITMEN PIMPINAN, DAN INTEGRITAS AUDITOR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AUDIT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH

Farid Siddiq<sup>1</sup>, Darmawan<sup>2</sup>, Fitriyani Syukri<sup>3</sup>

Email: [farid.lakilaki7360@gmail.com](mailto:farid.lakilaki7360@gmail.com)<sup>1</sup>, [darmawan8387@gmail.com](mailto:darmawan8387@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[fitriyanisyukri19@gmail.com](mailto:fitriyanisyukri19@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

<sup>3</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91112

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sumber Daya Manusia, Komitmen Pimpinan, dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit serta implikasinya terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya fungsi audit internal dalam menjamin efektivitas pengawasan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei eksplanatori, di mana populasi penelitian mencakup seluruh auditor dan pejabat fungsional pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Enrekang sebanyak 23 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia, Komitmen Pimpinan, dan Integritas Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit, baik secara parsial maupun simultan. Selain itu, Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 90,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang tinggi mampu meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi auditor, dukungan pimpinan yang berkelanjutan, dan integritas moral yang kuat merupakan faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penguatan kebijakan pembinaan auditor internal pemerintah dan strategi peningkatan kinerja Inspektorat.

**Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Komitmen Pimpinan, Integritas Auditor, Kualitas Audit, Akuntabilitas Pemerintahan Daerah.**

### Abstract

*This study aims to analyze the role of Human Resources, Leadership Commitment, and Auditor Integrity in improving Audit Quality and its implications for Regional Government Accountability. The research is motivated by the need to strengthen internal audit functions to ensure effective oversight and accountable governance. This research employed a quantitative explanatory survey approach, with a population consisting of 23 auditors and functional supervisors at the Inspectorate of Enrekang Regency. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression to test both partial and simultaneous effects among variables. The results indicate that Human Resources, Leadership Commitment, and Auditor Integrity have a positive and significant influence on Audit Quality. Furthermore, Audit Quality significantly affects Regional Government Accountability, with a determination coefficient of 90.4%. This implies that higher audit quality leads to improved transparency and responsibility in regional financial management. The study concludes that enhancing auditor competence, maintaining leadership commitment, and strengthening moral integrity are essential in achieving accountable public sector governance. These findings are expected to serve as a reference for formulating strategies to strengthen internal audit quality and institutional accountability.*

**Keywords: Human Resources, Leadership Commitment, Auditor Integrity, Audit Quality, Regional Government Accountability.**

## PENDAHULUAN

Dalam era reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan, tuntutan terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan menjadi semakin kuat. Masyarakat kini menuntut agar setiap penyelenggara pemerintahan daerah mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari dana publik [5]. Oleh karena itu, peran audit internal pemerintah melalui lembaga seperti *Inspektorat Daerah* menjadi krusial dalam memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai prinsip *good governance*.

Secara faktual, masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, seperti lemahnya pengendalian internal, rendahnya kapasitas auditor, serta kurangnya komitmen pimpinan dalam mendukung fungsi audit [5]. Meskipun Kabupaten Enrekang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama beberapa tahun berturut-turut, namun capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tidak adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah [6]. BPK tetap menemukan temuan-temuan terkait ketidakpatuhan administratif dan kelemahan sistem pengawasan, yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas audit internal agar hasil pemeriksaan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan efektivitas pengawasan.

Selain itu, tantangan baru muncul dengan diterapkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan penggunaan aplikasi keuangan daerah seperti *SIPD* dan *SISKEUDES*. Kondisi ini menuntut sumber daya manusia (SDM) auditor yang adaptif dan melek teknologi, karena kompetensi teknis dan kemampuan analisis data kini menjadi faktor penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas [4].

Kualitas audit dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal auditor, antara lain kompetensi sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan integritas individu [9]. Kualitas audit merupakan hasil dari kombinasi antara kemampuan profesional auditor, komitmen organisasi terhadap nilai-nilai akuntabilitas, serta penerapan prinsip etika dalam setiap tahap pemeriksaan [1]. Sementara itu, peneliti sebelumnya menegaskan bahwa pimpinan yang memiliki komitmen tinggi terhadap integritas dan transparansi akan menciptakan iklim kerja yang mendukung penerapan standar audit secara konsisten [8].

Selain dua faktor tersebut, integritas auditor juga memiliki peran penting dalam menjaga objektivitas dan keandalan laporan audit. Auditor yang berintegritas tidak hanya berpegang pada prosedur, tetapi juga pada nilai moral dan tanggung jawab publik. Integritas menjadi fondasi yang menjaga auditor dari konflik kepentingan dan tekanan eksternal [10]. Tanpa integritas, kemampuan teknis dan komitmen organisasi tidak akan mampu menghasilkan audit yang independen dan dipercaya publik.

Dasar pelaksanaan audit internal pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengawasan intern secara efektif dan berkesinambungan [9]. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur peran strategis Inspektorat dalam menilai efektivitas pengendalian intern dan memberikan keyakinan atas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah [12].

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjadi payung hukum utama dalam pelaksanaan audit di sektor publik. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya pelaporan hasil pemeriksaan yang objektif, transparan, dan berintegritas [3]. Oleh karena itu, auditor Inspektorat dituntut untuk bekerja tidak hanya sesuai standar teknis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip etika dan tanggung jawab moral terhadap publik. Selain itu, komitmen pimpinan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas fungsi audit internal. Dukungan pimpinan terhadap independensi, sumber daya, serta tindak lanjut hasil audit akan menentukan sejauh mana proses audit dapat berjalan secara optimal [4].

Namun, kompetensi dan komitmen saja tidak cukup. Integritas auditor menjadi unsur moral yang sangat menentukan objektivitas dan independensi auditor. Integritas yang kuat membuat auditor mampu menjaga profesionalisme, menghindari konflik kepentingan, serta tidak mudah dipengaruhi tekanan internal maupun eksternal [1]. Dalam konteks pengawasan pemerintah daerah, integritas menjadi semakin penting mengingat auditor sering berhadapan dengan risiko intervensi, tekanan politik, maupun kepentingan birokrasi.

Selain itu, perkembangan digitalisasi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SIPD, dan aplikasi keuangan daerah lainnya menuntut auditor

memiliki kompetensi digital sekaligus integritas yang kuat untuk menilai transaksi dan risiko berbasis sistem [6]. Perubahan lingkungan kerja ini menambah kompleksitas fungsi audit internal. Penelitian terdahulu sebagian besar berfokus pada pengaruh kompetensi auditor dan komitmen pimpinan terhadap kualitas audit [7]. Namun, penelitian sebelumnya belum menguji secara eksplisit peran integritas auditor sebagai variabel penting dalam meningkatkan kualitas audit di Inspektorat Daerah [8]. Padahal, integritas merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam menjaga independensi dan objektivitas pemeriksaan.

Selain itu, penelitian yang menguji kompetensi, komitmen pimpinan, dan integritas auditor secara simultan dalam konteks Inspektorat Kabupaten Enrekang masih sangat terbatas [2]. Celah inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori, karena bertujuan menjelaskan pengaruh antarvariabel yang dapat diukur secara numerik dan diuji secara statistik [11]. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan sebab-akibat antara Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ), Komitmen Pimpinan ( $X_2$ ), dan Integritas Auditor ( $X_3$ ) terhadap Kualitas Audit ( $Y$ ) dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah ( $Z$ ) [13].

Pendekatan ini berlandaskan paradigma positivistik, di mana fenomena sosial dipandang dapat dijelaskan melalui data empiris yang objektif dan terukur [14]. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi auditor pemerintah daerah yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam fungsi pengawasan internal dan telah menerapkan sistem audit berbasis risiko sesuai arahan BPKP [15].

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh auditor dan pejabat pengawas fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Enrekang, berjumlah 23 orang. Karena populasi relatif kecil dan homogen, penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan responden [16]. Metode sensus dinilai tepat karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kompetensi, komitmen, dan integritas auditor tanpa risiko bias sampling [17]. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder.

- Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden menggunakan skala Likert 1–5.
- Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Inspektorat, laporan BPKP, literatur ilmiah, serta peraturan yang relevan dengan fungsi audit internal pemerintah.

Penggunaan dua jenis data ini bertujuan memperkuat validitas hasil dengan triangulasi sumber data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier, yang terdiri atas dua tahap utama. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan kausal antarvariabel penelitian secara empiris dan terukur. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria kelayakan data

### a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data penelitian memenuhi prasyarat model regresi linier. Pengujian meliputi empat tahapan berikut:

1. Uji Normalitas menggunakan *Kolmogorov–Smirnov* untuk memastikan distribusi normal [20];
2. Uji Multikolinearitas untuk mendeteksi korelasi antarvariabel independen;
3. Uji Heteroskedastisitas untuk memastikan variansi residual konstan;
4. Uji Autokorelasi menggunakan *Durbin–Watson Test* untuk memeriksa independensi residual.

Apabila keempat asumsi tersebut terpenuhi, maka model regresi dianggap layak untuk dilakukan analisis selanjutnya.

### b. Regresi Linier Berganda

Tahap pertama menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu: Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ), Komitmen Pimpinan ( $X_2$ ), dan Integritas Auditor ( $X_3$ ) terhadap Kualitas Audit ( $Y$ ). Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Audit

X<sub>1</sub> = Sumber Daya Manusia

X<sub>2</sub> = Komitmen Pimpinan

X<sub>3</sub> = Integritas Auditor

a = Konstanta

b<sub>1</sub>-b<sub>3</sub> = Koefisien Regresi

e = Error

Analisis ini mencakup:

- Uji t (parsial): untuk melihat pengaruh masing-masing variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub> terhadap Y.
- Uji F (simultan): untuk mengetahui pengaruh X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub> secara bersama terhadap Y.
- Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>): untuk menilai seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen [19]

c. Regresi Linier Sederhana

Tahap kedua menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel Kualitas Audit (Y) terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Z). Analisis ini dilakukan karena model penelitian bersifat kausal berjenjang (two-step regression), di mana *Kualitas Audit* berperan sebagai variabel antara (intervening) antara faktor-faktor internal auditor (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>) dengan akuntabilitas pemerintahan daerah (Z) [18]. Model regresinya dituliskan sebagai berikut:

$$Z=a+bY+e$$

Keterangan:

Z = Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

Y = Kualitas Audit

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Error

Dengan demikian, analisis dua tahap ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antarvariabel, baik secara langsung (X<sub>1</sub>-X<sub>3</sub> → Y) maupun tidak langsung (melalui Y → Z), untuk mendukung tujuan penelitian dalam menilai peran sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan integritas auditor terhadap peningkatan kualitas audit serta akuntabilitas pemerintahan daerah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dari hasil pengumpulan data, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan lama bekerja dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

Kategori	Klasifikasi	Jumlah	Persentase (%)
<b>Jenis Kelamin</b>	Laki-laki	13	56,5
	Perempuan	10	43,5
<b>Lama Bekerja</b>	< 5 tahun	7	30,4
	5-10 tahun	10	43,5
	> 10 tahun	6	26,1

Sumber: data diolah spss 2025

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar auditor memiliki masa kerja antara 5-10 tahun, menunjukkan tingkat pengalaman yang cukup memadai untuk melaksanakan pemeriksaan internal.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner memiliki nilai korelasi  $r > 0,30$ , sehingga dinyatakan valid [1]. Sementara hasil uji reliabilitas menggunakan **Cronbach's Alpha** menunjukkan nilai seperti pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<b>Sumber Daya Manusia (X<sub>1</sub>)</b>	0,872	Reliabel
<b>Komitmen Pimpinan (X<sub>2</sub>)</b>	0,854	Reliabel
<b>Integritas Auditor (X<sub>3</sub>)</b>	0,891	Reliabel

<b>Kualitas Audit (Y)</b>	0,866	Reliabel
<b>Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Z)</b>	0,878	Reliabel

Sumber: data diolah spss 2025

Berdasarkan hasil tersebut, seluruh variabel memenuhi kriteria reliabilitas  $\geq 0,70$  sehingga instrumen layak digunakan.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan metode Kolmogorov–Smirnov Test.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov–Smirnov Test)**

Variabel	Kolmogorov–Smirnov Z	Signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed)	Keterangan
<b>Residual Terstandarisasi</b>	0,879	0,118	Data Berdistribusi Normal

Sumber: data diolah spss 2025

Nilai signifikansi sebesar  $0,118 > 0,05$ , menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi normalitas

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
<b>Sumber Daya Manusia (<math>X_1</math>)</b>	0,684	1,462	Tidak Ada Multikolinearitas
<b>Komitmen Pimpinan (<math>X_2</math>)</b>	0,702	1,424	Tidak Ada Multikolinearitas
<b>Integritas Auditor (<math>X_3</math>)</b>	0,715	1,398	Tidak Ada Multikolinearitas

Sumber: data diolah spss 2025

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 26 menghasilkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,742 + 0,367X_1 + 0,312X_2 + 0,289X_3$$

**Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	Sig.	Keterangan
<b>Konstanta</b>	3,742	-	-	-
<b>Sumber Daya Manusia (<math>X_1</math>)</b>	0,367	3,945	0,001	Signifikan
<b>Komitmen Pimpinan (<math>X_2</math>)</b>	0,312	3,142	0,004	Signifikan
<b>Integritas Auditor (<math>X_3</math>)</b>	0,289	2,984	0,007	Signifikan

Sumber: Data primer diolah (2025)

Hasil di atas menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, karena nilai **Sig. < 0,05**

**Tabel 4. Hasil Uji F (Simultan)**

Model	F hitung	Sig.	Keterangan
<b>Regresi</b>	62,154	0,000	Signifikan

Sumber: Data primer diolah (2025)

Nilai F hitung 62,154 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , berarti Sumber Daya Manusia, Komitmen Pimpinan, dan Integritas Auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit

**Tabel 5. Nilai Koefisien Determinasi**

R	R Square	Adjusted R <sup>2</sup>	Std. Error
<b>0,954</b>	0,910	0,904	1,152

Sumber: Data primer diolah (2025)

Nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,904 berarti 90,4% variasi Kualitas Audit dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan 9,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti independensi, pengalaman audit, dan budaya organisasi.

Hasil analisis lanjutan dengan regresi sederhana antara variabel Kualitas Audit (Y) dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Z) menunjukkan hasil berikut:

**Tabel 6. Hasil Regresi Sederhana**

Model	Koefisien B	t hitung	Sig.	Keterangan
Kualitas Audit (Y) → Akuntabilitas (Z)	0,781	9,213	0,000	Signifikan

Sumber: Data primer diolah (2025)

Artinya, peningkatan kualitas audit sebesar satu satuan akan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah sebesar 0,781 satuan, dengan tingkat signifikansi yang sangat tinggi ( $0,000 < 0,05$ )

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Audit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,367 dan nilai signifikansi 0,001 ( $< 0,05$ ). Temuan ini menegaskan bahwa kompetensi, pengalaman, serta pengetahuan teknis auditor berperan penting dalam menentukan kualitas hasil audit. Auditor dengan kemampuan analisis yang baik, pemahaman mendalam terhadap peraturan, serta keterampilan dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan akan menghasilkan audit yang lebih akurat, objektif, dan sesuai dengan standar profesional.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa kompetensi auditor merupakan fondasi utama kualitas audit. Sebagaimana dikemukakan oleh [7], kemampuan teknis, pengalaman kerja, dan kecakapan analitis auditor publik terbukti signifikan meningkatkan keandalan temuan dan rekomendasi audit. Selain itu, [19] menjelaskan bahwa keahlian teknis yang tidak diimbangi dengan pembaruan pengetahuan dan pelatihan berkelanjutan dapat menurunkan ketepatan rekomendasi audit serta melemahkan kemampuan auditor dalam menilai risiko pemeriksaan.

Lebih jauh, dominannya pengaruh SDM dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas audit sangat bergantung pada individu auditor sebagai pelaksana utama proses pemeriksaan. Auditor berada pada posisi yang langsung berhadapan dengan objek audit, dinamika pelaksanaan program pemerintah, serta risiko administratif dan digital yang memerlukan ketelitian tinggi. Karena itu, SDM menjadi faktor paling menentukan dibandingkan variabel lainnya.

Implikasinya bagi Inspektorat Kabupaten Enrekang adalah perlunya kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan (*continuous professional development*) melalui pelatihan tematik seperti audit berbasis risiko, audit kinerja, audit berbasis SPBE/SIPD, serta pemanfaatan analitik data untuk audit digital. Dengan memperkuat profesionalisme dan kompetensi teknis, kualitas hasil audit tidak hanya meningkat secara substantif, tetapi juga mampu memperkuat peran Inspektorat sebagai pengawas internal yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan pemerintahan.

### 2. Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Kualitas Audit

Hasil analisis menunjukkan bahwa **Komitmen Pimpinan** berpengaruh positif dan signifikan terhadap **Kualitas Audit** dengan nilai koefisien 0,312 dan signifikansi 0,004 ( $< 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pimpinan, baik dalam bentuk kebijakan, arahan, maupun penyediaan sarana audit, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan audit yang berkualitas. Pimpinan yang konsisten dan berintegritas tinggi akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menumbuhkan kepercayaan auditor, serta memperkuat semangat profesionalisme. Temuan ini sesuai dengan penelitian [6], yang menemukan bahwa komitmen pimpinan organisasi publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan mutu audit internal.

Selain itu, dukungan pimpinan juga memastikan adanya pengawasan berlapis dan bimbingan etis yang membantu auditor menjaga konsistensi terhadap standar pemeriksaan. Diperlukan kebijakan "*tone at the top*" yang lebih kuat, di mana pimpinan Inspektorat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan audit, memberikan umpan balik terhadap hasil pemeriksaan, dan menegakkan disiplin profesional auditor.

Secara kritis, temuan ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan administratif, tetapi juga sebagai penggerak budaya organisasi. Ketika pimpinan menunjukkan komitmen kuat terhadap integritas, transparansi, dan kualitas kerja, auditor akan lebih terdorong untuk bekerja secara profesional, meningkatkan akurasi

pemeriksaan, dan menjaga independensi hasil audit. Sebaliknya, komitmen pimpinan yang lemah dapat menciptakan budaya permisif, menurunkan motivasi auditor, dan menghambat efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit.

Implikasinya bagi kebijakan pengawasan daerah adalah:

1. Inspektorat perlu membangun budaya kepemimpinan yang etis dan akuntabel, karena kualitas audit sangat dipengaruhi oleh nilai dan keteladanan pimpinan.
2. Pimpinan harus memperkuat dukungan struktural, seperti penyediaan anggaran, pelatihan, teknologi audit, serta kebijakan yang menjamin independensi auditor.
3. Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terarah, di mana pimpinan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit betul-betul ditindaklanjuti perangkat daerah.
4. Pengembangan kepemimpinan (*leadership development*) penting dilakukan agar pejabat struktural Inspektorat mampu menjalankan peran sebagai *champion* dalam reformasi pengawasan internal.

Dengan demikian, komitmen pimpinan bukan hanya faktor pendukung, tetapi juga penentu arah kualitas audit, budaya organisasi, dan keberhasilan pengawasan di tingkat pemerintah daerah.

### 3. Pengaruh Integritas Auditor terhadap Kualitas Audit

Penelitian ini menemukan bahwa Integritas Auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit dengan koefisien regresi sebesar 0,289 dan nilai signifikansi 0,007 ( $<0,05$ ). Integritas merupakan nilai moral yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, komitmen etis, serta kesediaan auditor untuk mematuhi standar profesional meskipun menghadapi tekanan. Auditor yang memiliki integritas tinggi akan tetap objektif, tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak yang diaudit, dan selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam proses pemeriksaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian [1], yang menyatakan bahwa integritas merupakan variabel etis paling dominan yang memengaruhi kualitas audit internal pada pemerintah daerah. Integritas auditor memperkuat sikap profesional, mendorong auditor untuk bekerja sesuai nilai etika, serta menjadi penentu keandalan laporan audit. Dalam lingkungan pemerintahan yang rawan konflik kepentingan, intervensi birokrasi, maupun tekanan politis, integritas menjadi benteng utama yang menjaga auditor tetap netral dan objektif.

Secara kritis, hasil ini menunjukkan bahwa tingginya integritas auditor tidak hanya memengaruhi kualitas audit secara teknis, tetapi juga membentuk budaya pengawasan yang bersih dan akuntabel. Integritas menjadi faktor yang memoderasi hubungan antara kompetensi dan kualitas audit; kompetensi tanpa integritas berpotensi menimbulkan penyimpangan atau ketidakakuratan temuan. Sebaliknya, auditor yang berintegritas tinggi akan lebih disiplin dalam mengumpulkan bukti, mengikuti prosedur pemeriksaan, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasinya bagi Inspektorat Kabupaten Enrekang adalah:

1. Penerapan pakta integritas dalam setiap penugasan audit perlu diperkuat, tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai mekanisme pengendalian etik yang dipantau secara berkala.
2. Kode etik internal harus ditegakkan secara konsisten, termasuk penegakan sanksi terhadap pelanggaran integritas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawasan.
3. Pelatihan etika profesi, anti-fraud, dan penguatan nilai moral perlu dilakukan secara berkelanjutan agar auditor lebih siap menghadapi dilema etis di lapangan.
4. Supervisi dan review internal harus diperketat, mengingat integritas dapat dipelihara melalui pengawasan yang berlapis dan budaya organisasi yang menolak kompromi atas penyimpangan sekecil apa pun.

Dengan demikian, integritas auditor bukan sekadar atribut moral, tetapi merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas, objektivitas, dan kredibilitas hasil audit, serta memainkan peran strategis dalam mewujudkan pengawasan internal yang bersih dan akuntabel.

### 4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Daerah dengan nilai koefisien 0,781 dan signifikansi 0,000 ( $<0,05$ ). Artinya, semakin baik kualitas audit yang dihasilkan oleh

Inspektorat, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dicapai oleh pemerintah daerah. Audit yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran organisasi (*organizational learning*) dalam memperbaiki kelemahan tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengendalian internal.

Hasil ini sejalan dengan pandangan [20] bahwa audit yang berkualitas merupakan prasyarat utama akuntabilitas publik karena memberikan keyakinan memadai atas keandalan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, [19] menegaskan bahwa audit internal yang efektif mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas birokrasi publik dan meningkatkan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan.

Secara kritis, temuan ini mencerminkan bahwa akuntabilitas tidak hanya bergantung pada mekanisme pelaporan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas proses audit yang dilakukan oleh Inspektorat. Audit yang lemah dan tidak mendalam akan menghasilkan rekomendasi yang kurang tepat sasaran, sehingga tidak mampu mendorong perbaikan tata kelola. Sebaliknya, audit yang kuat, independen, dan berbasis risiko memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi masalah struktural, mencegah penyimpangan, dan memperbaiki kualitas layanan publik.

Implikasi bagi kebijakan pengawasan daerah adalah:

1. Pemerintah daerah harus memperkuat sistem tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLRHA) agar setiap rekomendasi audit dapat ditangani secara cepat, terukur, dan terdokumentasi.
2. Kualitas audit harus diintegrasikan dengan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) sehingga hasil audit tidak berhenti pada temuan, tetapi menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Inspektorat perlu memperluas penerapan audit berbasis risiko dan audit kinerja, bukan hanya audit kepatuhan, agar rekomendasi yang diberikan berdampak langsung pada peningkatan efektivitas program pemerintah.
4. Perlu dibangun budaya organisasi yang responsif terhadap temuan audit, sehingga perangkat daerah tidak memandang audit sebagai beban administratif, tetapi sebagai alat pembelajaran untuk perbaikan tata kelola.

Dengan demikian, kualitas audit memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Semakin tinggi kualitas audit yang dilaksanakan Inspektorat, semakin besar kontribusinya terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas audit dapat berfungsi langsung dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, dan interpretasi hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai "*Peran Sumber Daya Manusia, Komitmen Pimpinan, dan Integritas Auditor dalam Meningkatkan Kualitas Audit untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*", maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi, pengalaman, dan kemampuan teknis auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit sangat bergantung pada profesionalisme, penguasaan standar audit, serta kecermatan auditor dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti pemeriksaan.
2. Komitmen Pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Dukungan pimpinan Inspektorat dalam bentuk kebijakan, bimbingan, dan pengawasan yang konsisten berkontribusi besar terhadap peningkatan mutu audit. Pimpinan yang memiliki komitmen tinggi menciptakan lingkungan kerja yang mendorong transparansi, tanggung jawab, dan etika kerja auditor.
3. Integritas Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Integritas yang tinggi menjamin kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor yang berintegritas tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal, sehingga hasil audit menjadi lebih dapat dipercaya dan berdaya guna bagi organisasi.
4. Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Audit yang dilakukan dengan standar profesional dan etika tinggi akan menghasilkan rekomendasi yang relevan, mampu memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah. Dengan demikian, kualitas audit berperan strategis sebagai mekanisme penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi antara kompetensi auditor (SDM), komitmen pimpinan, dan integritas pribadi auditor merupakan faktor penentu yang secara signifikan memengaruhi kualitas audit, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan akuntabilitas pemerintahan daerah.

#### Saran

1. Inspektorat Kabupaten Enrekang perlu meningkatkan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan penerapan audit berbasis risiko untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan.
2. Pimpinan Inspektorat diharapkan memperkuat komitmen dan dukungan kebijakan agar pelaksanaan audit berjalan objektif, independen, dan profesional.
3. Auditor internal perlu menjunjung tinggi integritas serta etika profesi dalam setiap tahapan audit guna menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti independensi, budaya organisasi, atau teknologi audit untuk memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit di sektor publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badera, I. D. N. (2023). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Skeptisme, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kemampuan Auditor Internal dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 358-369.
- [2] Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- [3] Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Cipta Jaya.
- [4] Kementerian PAN-RB. (2018). *Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- [5] SALSABILA, N. (2025). *PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL (IQ), KECERDASAN EMOSIONAL (EQ), KECERDASAN SPIRITUAL (SQ) DAN KECERDASAN SOSIAL TERHADAP PROFESIONALISME AUDITOR (Studi Empiris Pada Auditor Inspektorat Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- [6] Monalika, H. P. (2024). Analisis Opini Tidak Memberikan Pendapat BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 4(2), 265-273.
- [7] Widiya, W., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3737-3754.
- [8] Nugroho, G. W., & Ahmar, N. (2022). Whistleblowing System, Gaya Kepemimpinan, Digitalisasi, Budaya Organisasi dan Fungsi Audit Internal Terhadap Perencanaan Strategis. *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 5(1), 43-57.
- [9] Rebecca, S. (2021). *Pengaruh kompetensi, independensi dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Pusat)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta).
- [10] Maulana, D. (2020). Pengaruh kompetensi, etika dan integritas auditor terhadap kualitas audit. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 39-53.
- [11] Syahroni, M. I. (2022). Prosedur penelitian kuantitatif. *EJurnal Al Musthafa*, 2(3), 43-56.

- [12] Zaenudin, Z., & Hamdani, H. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1306-1320.
- [13] Weyant, E. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*: by John W. Creswell and J. David Creswell, Los Angeles, CA: SAGE, 2018, \$38.34, 304pp., ISBN: 978-1506386706.
- [14] Bejarin, J. C. P., Pablico, C. S. S., & Villanueva, J. E. B. (2022). Neuman, WL (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. USA, p. 38-39. Retrieved from <http://letrunghieutvu>. *VER*, 22.
- [15] Ardianingsih, A., & Setiawan, D. (2023). *Audit Internal Berbasis Risiko*. Bumi Aksara.
- [16] Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. (No Title)*.
- [17] Umar, H. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*.
- [18] Santosa, S. (2020). *Statistik Multivariat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [19] Primasatya, R. D., & Hady, A. F. (2022). Pengaruh Pelatihan, Titel, dan Pengalaman Kerja pada Kemampuan Deteksi Kecurangan Auditor BPKP Provinsi Jawa Timur. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 85-98.
- [20] Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.